

URGENSI PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH TANGGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

THE URGENCE OF FINANCIAL MANAGEMENT OF HOUSEHOLDS BENEFICIARIES OF THE HOPE FAMILY PROGRAM IN INCREASING WELFARE

Fasiha

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo,
Jl. Agatis Balandai Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia
E-mail:fasiha@iainpalopo.ac.id

Muhammad Alwi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo,
Jl. Agatis Balandai Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia
E-mail:muhammad_alwi@iainpalopo.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan mendeskripsikan pentingnya pengelolaan keuangan keluarga bagi penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mencapai kestabilan ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Metode deksriptif analitis dilakukan dalam penulisan artikel ini dan teknik studi pustaka dengan menggunakan komprehensif literatur dalam proses pengumpulan data, yaitu berbagai bentuk informasi dan referensi terkait issue pengelolaan keuangan rumah tangga keluarga penerima manfaat PKH. Dalam hasil kajian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan keuangan keluarga perlu dilakukan untuk mengatur dan merencanakan keuangan keluarga dengan mencatat seluruh pendapatan dan pengeluaran keluarga, membuat daftar perencanaan keuangan dan menabung secara periodik. Perempuan sebagai ibu rumah tangga memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan keluarga karena ibu rumah tangga adalah manajer dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan keluarga. Sehingga dalam kegiatan PKH ibu rumah tangga diberikan tanggung jawab dan kewenangan untuk mengelola uang bantuan sosial PKH, tujuan jangka panjang dari PKH adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan. Melalui materi modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha yang diberikan pendamping PKH, kesejahteraan ekonomi KPM PKH dapat diimplementasikan. Keberhasilan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan KPM PKH tidak lepas dari peran pendamping dalam melakukan pendampingan usaha KPM PKH dengan memaksimalkan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) PKH untuk memulai usaha mandiri.

Kata Kunci: pengelolaan keuangan, pkh, kesejahteraan.

Abstract

This article aims to describe the importance of managing family finances for beneficiaries of the Family Hope Program (PKH) to achieve economic stability and family welfare. An analytical descriptive method was used in writing this article and a literature study technique using comprehensive literature in the data collection process, namely various forms of information and references related to the issue of household financial management of PKH beneficiary families. The results of the study indicate that a family financial management strategy needs to be carried out to organize and plan family finances by recording all family income and expenses, making a list of financial planning and saving periodically. Women as housewives have a very important role in managing family finances because housewives are managers and are responsible for managing family finances. So that in PKH activities, housewives are given the responsibility and authority to manage PKH social assistance money, the long-term goal of PKH is to break the poverty chain. Through the financial management and business planning module materials provided by the PKH facilitator, the economic welfare of the PKH KPM can be implemented. The success of PKH in improving the welfare of KPM PKH cannot be separated from the role of assistants in providing business assistance to KPM PKH by maximizing the PKH Joint Business Group (KUBE) to start independent businesses.

Keywords: financial management, pkh, welfare.

PENDAHULUAN

Masalah keuangan rumah tangga merupakan masalah klasik yang sering terjadi dalam sebuah rumah tangga, seperti kekurangan dan kelebihan uang. Konflik dalam rumah tangga bisa berawal dari pengelolaan keuangan rumah tangga yang tidak baik. Penghasilan yang tidak berbanding lurus dengan kebutuhan dan ketidaktahuan dalam pengelolaannya bisa menjadi sumber malapetaka yang menyebabkan terjadinya perceraian (Ramli, M., & Apriyanto, 2020). Penghasilan dalam keluarga harus dikelola dengan baik agar pendapatan yang diterima sesuai dengan pengeluaran.

Keluarga yang berhasil dalam pengelolaan keuangan rumah tangga adalah keluarga yang mampu mengatur keuangan dengan menyelaraskan antara pendapatan yang diperoleh dengan penggunaan dana. Perencanaan dan pengaturan keuangan rumah tangga merupakan sesuatu yang penting dalam keberhasilan keuangan rumah tangga, sehingga jumlah kekayaan lebih besar dari liabilitasnya (Garlans, 2014). Setiap rumah tangga mempunyai karakter dan ciri khusus dalam mengelola keuangan rumah tangga untuk mencapai tujuan (Pangeran, 2012).

Ibu rumah tangga biasanya bertindak sebagai manajer dalam manajemen keluarga. Agar pengelolaan keuangan rumah tangga berjalan secara profesional, ibu rumah tangga harus memahami konsep utama tentang pengelolaan keuangan rumah tangga yaitu konsep cost dan benefit dan konsep arus kas (Andayani, 2019). Menurut Budi Gautama siregar pengelolaan dan pengaturan keuangan keluarga harus dilakukan secara sistematis dan cermat dengan tahapan perencanaan, implementasi dan evaluasi. Ibu rumah tangga yang memiliki kecerdasan dan ketepatan dalam mengelola keuangan keluarga akan mewujudkan keluarga yang sejahterah (Siregar, 2019).

Kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga merupakan hal yang penting dan utama dalam

keluarga sehingga diperlukan strategi pengelolaan keluarga khususnya yang terkait masalah keuangan (Sawal, 2020). Permasalahan keuangan dapat diminimalisir dengan memilih pola pengaturan keuangan yang tepat. Ibu rumah tangga akan mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan keluarga apabila biaya rutin atau pengeluaran bulanan lebih besar daripada pendapatan keluarga.

Pengelolaan keuangan rumah tangga yang tidak tepat dapat menyebabkan terjadinya ketidakstabilan rumah tangga. Munculnya hutang dan tunggakan kredit macet merupakan salah satu indikasinya (Setiowati, 2016). Karena itu, dibutuhkan peran perempuan dalam hal ini ibu rumah tangga yang handal dalam akuntansi rumah tangga untuk mengelola keuangan rumah tangga. Menurut survey Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kaum perempuan memiliki dominasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan keuangan di keluarga dibandingkan dengan laki-laki. Pengetahuan dan pemahaman terkait konsep keuangan sangat diperlukan oleh ibu rumah tangga agar terhindar dari kekeliruan dalam pengambilan keputusan keuangan keluarga (Rustandi Kartawinata, B., & Ikhwan Mubaraq, 2018).

Ibu rumah tangga memiliki peranan ganda dalam keluarga, selain mengurus semua anggota keluarga dan keperluan rumah tangga. Peran dan tanggung jawab yang besar adalah mengelolan dan mengatur keuangan keluarga (Maya Widyana Dewi, 2021). Ketika penghasilan keluarga habis dibelanjakan karena perencanaan kas keuangan yang tidak ada dan tidak adanya keterampilan ibu rumah tangga dalam manajemen keuangan keluarga maka akan menimbulkan masalah dalam keluarga. (Agus Supandi Soegoto, Diana N. Lintong, Syermi S.E. Mintalangi, 2020)

Pendapatan atau penghasilan keluarga yang besar jika tidak didukung perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik maka hasilnya

tidak efisien dan tidak banyak memberikan manfaat bagi keluarga. Terjadinya konflik keluarga dapat disebabkan dari kondisi keuangan keluarga yang tidak stabil. Terlebih dalam situasi ekonomi yang tidak stabil dampak dari pandemi Covid-19, hal ini dapat menjadi faktor terjadinya konflik dalam keluarga jika pengelolaan keuangan tidak dilakukan dengan baik (Maya Widyana Dewi, 2021).

Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya gejolak ekonomi yang membuat ibu rumah tangga perlu membuat strategi dalam mengatur keuangan keluarga. Hal ini terjadi karena harga kebutuhan pokok mengalami fluktuasi harga yang tidak stabil (M. Apriyanto, 2019). Pemenuhan kebutuhan keluarga tidak selamanya dipengaruhi oleh tinggi rendahnya penghasilan keluarga. Penghasilan yang rendah jika dikelola dengan baik dan cermat cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sementara penghasilan yang tinggi belum tentu dapat memenuhi kebutuhan, bilamana salah atau tidak tepat dalam mengelola keuangan rumah tangga (Muhammad Ramli, 2020).

Bagi keluarga kurang mampu di masa pandemi covid-19 mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang menyebabkan sulitnya mengatur dan mengelola keuangan keluarga. Berbagai bantuan jaminan perlindungan sosial disalurkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menstabilkan perekonomian di masa pandemi covid 19 (Iping, 2020). Salah satu program unggulan pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program jaminan perlindungan sosial yang telah lama berjalan dan mendapat perhatian dari pemerintah khususnya Kementerian Sosial RI. Pemerintah melalui PKH menyalurkan bantuan sembako kepada keluarga penerima manfaat PKH, pada masa pandemi covid-19. Selain itu, dimasa pandemi covid-19 pemerintah menyalurkan bantuan dalam bentuk uang tunai, beras dan sembako yang ditujukan kepada keluarga atau kelompok masyarakat yang paling

terdampak pandemi covid-19 seperti pekerja informal dan pelaku usaha (Sulni, 2021).

Melalui PKH upaya pengentasan kemiskinan terus dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah melalui kementerian sosial berkomitmen memberikan bantuan sosial bersyarat sebagai stimulus kepada masyarakat kurang mampu dan rentan yang sudah terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin (Nawangsari, 2019). Dana bantuan PKH diterima langsung oleh Ibu rumah tangga sebagai bentuk kesetaraan gender dan peran ibu rumah tangga dalam pengelolaan keuangan keluarga. Sehingga dalam pengelolaan dana bantuan PKH menjadi tanggung jawab ibu rumah tangga mulai dari pengambilan dana bantuan, proses membelanjakan dan menyimpan sisa dana bantuan PKH (Puspitawati, 2010).

PKH memberikan akses kepada ibu rumah tangga sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan program. Karena urusan domestik dan manajemen rumah tangga lebih di dominasi oleh ibu rumah tangga (Nainggolan, 2019). Selain menerima dana bantuan PKH, ibu rumah tangga yang terdaftar dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) wajib mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dan Family Development Session (FDS).

Dalam pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dan Family Development Session (FDS) terdapat pendamping PKH yang menjadi fasilitator (Evan Notatema Hia, 2021). Pendamping PKH memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pendampingan kepada KPM PKH yang terdaftar sebagai peserta program. Selain itu pendamping PKH adalah mitra pemerintah dan mitra masyarakat yang diharapkan dapat menjembatani berbagai kepentingan (Kisworo, 2017). Dalam P2K2 dan FDS diajarkan oleh pendamping PKH berbagai modul salah satu modul yang diajarkan yaitu tentang pengelolaan keuangan keluarga, mengatur pengeluaran agar seimbang dengan pendapatan, membedakan

antara kebutuhan dan keinginan, membuat target menabung dan menghindari hutang, serta meningkatkan penghasilan dengan membuka usaha (Febrianto, 2020).

Perbaikan kondisi ekonomi KPM PKH agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan merupakan tujuan dari materi pengelolaan keuangan keluarga dan perencanaan usaha. Namun demikian, kondisi ekonomi KPM PKH yang serba terbatas menyebabkan sulit untuk mengelola keuangan keluarga dan kesulitan dalam melakukan perencanaan usaha (Sabinus Beni, Blasius Manggu, 2020). Sehingga KPM PKH perlu membuat rincian anggaran pengelolaan keuangan keluarga dengan menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran keluarga. Melalui modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha keluarga, pendamping PKH memberikan edukasi, pemahaman dan pendampingan terkait pengelolaan keuangan rumah tangga dan cara untuk memulai usaha mandiri.

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan pentingnya pengaturan dan pengelolaan keuangan bagi rumah tangga KPM PKH. Sehingga kebutuhan hidup tercukupi dengan baik dan tidak menimbulkan konflik internal keluarga terkait masalah ekonomi. Strategi pengaturan dan pengelolaan keuangan keluarga harus dimiliki oleh ibu rumah tangga sebagai penanggung jawab keuangan keluarga. Melalui P2K2 dalam sesi pengelolaan keuangan keluarga, peran pendamping sangat dibutuhkan dalam pendampingan pengelolaan keuangan dan pemberdayaan ekonomi keluarga KPM PKH, agar KPM PKH mengalami peningkatan dalam kesejahteraan sosial dan diharapkan juga bisa menurunkan angka kemiskinan.

MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan Uraian yang telah dipaparkan di atas maka ditarik fokus masalah yaitu:

1. Bagaimana strategi yang harus dilakukan dalam pengaturan dan pengelolaan keuangan rumah tangga?

2. Bagaimana peranan ibu rumah tangga (KPM PKH) dalam mengatur dan mengelola keuangan rumah tangga?
3. Bagaimana kontribusi pendamping PKH dalam pemberdayaan ekonomi KPM PKH?

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengidentifikasi strategi yang harus dilakukan dalam pengaturan dan pengelolaan keuangan rumah tangga.
2. Menganalisis peranan ibu rumah tangga (KPM PKH) dalam mengatur dan mengelola keuangan rumah tangga.
3. Mengetahui kontribusi pendamping PKH dalam pemberdayaan ekonomi KPM PKH.

METODE KAJIAN

Metode deksriptif analitis dilakukan dalam penulisan artikel ini dan teknik studi pustaka dengan menggunakan komprehensif literatur dalam proses pengumpulan data, yaitu berbagai bentuk informasi dan referensi terkait issue pengelolaan keuangan rumah tangga keluarga penerima manfaat PKH.

PEMBAHASAN

1. Strategi dalam pengaturan dan pengelolaan keuangan rumah tangga

Kemakmuran ekonomi keluarga dapat tercapai dengan strategi pengelolaan keuangan yang tepat (M. R. dan M. Apriyanto, 2020). Dalam penggunaan anggaran rumah tangga ada beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya, memahami portofolio keuangan keluarga, menyusun rencana keuangan atau anggaran, memikirkan secara seksama pengertian antara butuh dan ingin, menghindari hutang, meminimalkan belanja konsumtif, menetapkan tujuan atau cita-cita finansial, menabung, dan berinvestasi (Ningsih, 2021).

Pengelolaan keuangan rumah tangga merupakan usaha untuk merencanakan,

melaksanakan, memonitor, mengevaluasi, dan mengatur penghasilan atau pendapatan keluarga. Mengatur sumber-sumber ekonomi keluarga khususnya keuangan agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga secara berkesinambungan dan stabilitas serta pertumbuhan ekonomi keluarga dapat terjaga (Sina, 2020). Pengelolaan keuangan keluarga atau perencanaan keuangan keluarga dapat dilakukan dengan merinci daftar pemasukan dan pengeluaran keluarga. Dengan adanya daftar terperinci, ibu rumah tangga sebagai manager keuangan keluarga dapat melakukan deteksi dini bilamana terjadi penyimpangan terhadap rencana keuangan (Fitria Nur Masithoh, 2016).

Pengelolaan keuangan rumah tangga merupakan hal yang urgen karena memiliki implikasi terhadap keluarga yang di dalamnya terdapat istri/suami, anak-anak dan orang tua atau mertua. Kesejahteraan keluarga adalah tujuan dalam sebuah keluarga dan harus menjadi prioritas dalam keluarga, karena itu perencanaan keuangan keluarga harus dilakukan agar penghasilan dan pengeluaran keluarga dapat seimbang (Hermaliana, 2019).

Strategi dan target yang jelas dalam pengelolaan keuangan keluarga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Perencanaan keuangan keluarga yang tepat dapat menstabilkan ekonomi keluarga untuk mencapai keluarga sejahtera (M. Apriyanto, 2019). Setiap ibu rumah tangga atau keluarga memiliki strategi yang berbeda-beda dalam perencanaan keuangan, karena yang paling memahami kondisi keuangan keluarga adalah keluarga itu sendiri. Hal ini di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu status, materi, pekerjaan, kondisi ekonomi, usia, dan aset yang dimiliki. Namun demikian strategi dalam perencanaan keuangan keluarga harus terencana dengan baik dan dibuat sesuai dengan kondisi keuangan keluarga (Muhammad Ramli, 2020).

Pengelolaan keuangan rumah tangga harus dilakukan secara berkesinambungan dalam

jangka panjang, sehingga ibu rumah tangga tidak mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan dan mengatur ekonomi rumah tangga. Tetapi banyak rumah tangga yang hanya melakukan pengelolaan jangka pendek yang hanya memprioritaskan kebutuhan saat ini saja, padahal pengelolaan keuangan target jangka panjang sangat dibutuhkan dalam keluarga.

Perencanaan keuangan keluarga perlu dilakukan secara cermat dan teliti untuk mencapai tujuan perencanaan keuangan keluarga yang diharapkan. Karena itu, diperlukan suatu strategi, langkah dan proses dalam pengambilan keputusan keuangan yang tepat. Sehingga posisi keuangan keluarga dapat diketahui untuk mengatur pemenuhan kebutuhan keluarga. Strategi dan langkah dalam proses perencanaan keuangan yang membantu mencapai tujuan keuangan keluarga dapat dilakukan langkah sebagai berikut (Antoni Japari, 2010):

- a. Melakukan diagnosa kondisi keuangan saat ini;
- b. Menentukan prioritas pemenuhan kebutuhan untuk menetapkan tujuan keuangan;
- c. Mencari dan menganalisis informasi yang ada;
- d. Merencanakan tindakan dalam mencapai tujuan;
- e. Melakukan implementasi dan control terhadap perencanaan keuangan;

Selain itu, tujuan dibuatnya strategi dalam perencanaan keuangan keluarga adalah sebagai berikut (Prasetyo, 2010):

- a. Melakukan kontrol terhadap pola belanja, pola belanja konsumtif banyak diterapkan oleh mayoritas masyarakat moderen yang dapat menyeret kedalam lubang kemiskinan dalam waktu yang singkat.
- b. Mengantisipasi biaya hidup yang semakin tinggi, kebutuhan pokok harus tetap terpenuhi setiap hari, sementara alat pemenuhan kebutuhan setiap hari mengalami kenaikan. Sehingga strategi perencanaan keuangan sangat diperlukan untuk

mengantisipasi pemenuhan kebutuhan keluarga.

- c. Kesiapan dalam menghadapi kondisi perekonomian yang cenderung tidak stabil, perekonomian terkadang berada pada kondisi yang tidak stabil dan mengalami pasang surut. Seperti pada kondisi pandemi covid-19 di mana perekonomian secara makro mengalami keterpurukan. Jika keluarga tidak mempersiapkan perencanaan keuangan keluarga dengan baik maka kondisi keuangan keluarga akan tidak stabil.
- d. Mempersiapkan keuangan pada masa tidak produktif, manusia pada umumnya mengalami keterbatasan dalam segala hal termasuk kesehatan dalam bekerja. Pada kondisi fisik dan kesehatan baik dapat melakukan pekerjaan apapun, namun beda halnya ketika kondisi kesehatan tidak baik maka tidak bisa melakukan pekerjaan yang produktif.

Santoso mengemukakan bahwa pengelolaan keuangan keluarga dapat memberikan efek jangka panjang yaitu mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Permasalahan ekonomi keluarga dapat diatasi dengan pengelolaan keuangan keluarga dengan melakukan pencatatan semua aset atau harta yang dimiliki, mencatat semua penghasilan keluarga dan biaya pengeluaran, mengidentifikasi biaya pengeluaran rutin mingguan, bulanan dan tahunan, menyusun daftar rencana pengeluaran dan manabung secara periodik (Santoso, 2018).

Pada masa pandemi Covid-19 strategi pengelolaan keuangan rumah tangga sangat dibutuhkan dalam mengatur pengeluaran rumah tangga. Dampak pandemi Covid-19 mengguncang ekonomi rumah tangga, di mana penghasilan rumah tangga semakin berkurang sementara pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan tetap harus dipenuhi. Efek tersebut mengharuskan keluarga bijak dalam mengelola keuangan rumah tangga agar dapat bertahan di masa pandemi covid-19 dan mampu

menyesuaikan kondisi keuangan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga.

2. Peranan ibu rumah tangga (KPM PKH) dalam mengatur dan mengelola keuangan rumah tangga

Perempuan mempunyai kedudukan dalam masyarakat sebagai makhluk individu dan sosial, sehingga perempuan mempunyai hak untuk menentukan dan melakukan sesuatu sesuai dengan kebebasan pribadinya. Perempuan mempunyai peran yang sangat penting dan tidak tergantikan dalam keluarga sebagai ibu rumah tangga. Pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mendidik, melayani kebutuhan keluarga, dan mengatur keuangan keluarga merupakan pekerjaan yang banyak dilakukan oleh ibu rumah tangga (Aswiyati, 2016).

Ibu rumah tangga sebagai sosok perempuan yang tangguh dalam keluarga mampu melakukan pekerjaan dan tugas yang berat dalam rumah tangga. Ibu rumah tangga mampu menjadi manajer dalam keluarga, pendidik, perawat, koki, pelindung, panutan, akuntan keluarga, motivator keluarga, dokter keluarga, psikolog bagi anak dan keluarga, fashion designer, interior designer, event organizer, sekretaris keluarga, ahli perbaikan, sahabat bagi anak dan keluarga, pegawai tauladan dalam keluarga, penjaga kebersihan, sebagai partner kerja, sebagai superhero dan berbagai tugas lainnya dalam keluarga. Dari kesemua pekerjaan ini, sosok ibu sebagai perempuan tidak bisa digantikan oleh laki-laki (Suarmini, 2018).

Ibu rumah tangga memiliki kewenangan sebagai seorang manajer dalam keluarga dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan dalam keluarga (Syarifah, 2018). Manajemen pengelolaan keuangan rumah tangga berbeda-beda dalam setiap rumah tangga, karena masing-masing rumah tangga memiliki cara yang berbeda dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Penghasilan atau pendapatan suami

akan diserahkan sepenuhnya kepada istri sebagai ibu rumah tangga yang mengatur keuangan (Setiowati, 2016). Ibu rumah tangga mempunyai peranan dalam menentukan pengaturan rumah tangga seperti menjaga, memelihara dan melaksanakan peranannya sebagai seorang ibu dalam keluarga (Syhatan, 2004). Menyelesaikan konflik dan menyatukan anggota keluarga serta perencanaan, penyelesaian masalah keuangan, keluar masuknya uang merupakan tugas dan tanggung jawab ibu rumah tangga. Karena itu ibu rumah tangga harus mampu mengatur dan mengendalikan masalah keuangan keluarga.

Menurut Puspita bahwa ketidakmampuan ibu rumah tangga dalam melakukan pengendalian dan pengelolaan keuangan akan melahirkan kesulitan, kecemasan dan penyakit dalam rumah tangga bahkan konflik keluarga (Kusnadi, 2021). Dalam kehidupan rumah tangga perencanaan dan pengelolaan keuangan sangatlah penting. Suatu perencanaan anggaran keuangan perlu dilakukan untuk mencegah konflik di dalam rumah tangga. Manajemen keuangan rumah tangga akan jauh lebih baik apabila pengelolaan keuangan dilakukan oleh istri sebagai ibu rumah tangga, karena proses pemenuhan kebutuhan keluarga diatur oleh ibu rumah tangga.

Penggunaan anggaran keuangan keluarga harus jelas tujuannya, karena itu diperlukan perencanaan keuangan yang baik. Dengan perencanaan yang terstruktur maka tujuan ekonomi keluarga dapat tercapai dan jangka waktu pencapaiannya dapat ditetapkan (Setiowati, 2016). Karena itu, ibu rumah tangga sebagai penanggung jawab keuangan keluarga harus melakukan perencanaan keuangan yang jelas dalam skala jangka waktu pendek, menengah dan panjang untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga.

Dalam Perencanaan keuangan keluarga peranan ibu rumah tangga tidak bisa dinapikan. Dengan berjalannya perencanaan keuangan keluarga dengan baik maka kesejahteraan

keluarga dapat terwujud. Tahapan dalam pola perencanaan dan pengelolaan keuangan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan penilaian. Aktualisasi pengelolaan keuangan yang baik ketika memenuhi kriteria tersebut (Rahmah, 2014).

Pembentukan keluarga sejahtera tidak lepas dari kontribusi dan peran perempuan sebagai ibu rumah tangga dalam keluarga yang memiliki arti penting dan sangat berharga, dalam kehidupan masyarakat, karena keluarga adalah unit terkecil yang bisa mewujudkan masyarakat madani. Dengan terbentuknya keluarga yang sehat dan sejahtera dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk mewujudkan bangsa dan negara yang maju dibutuhkan masyarakat yang sehat dan sejahtera.

Salah satu program pemerintah dalam mewujudkan masyarakat sejahtera adalah PKH. Karena itu, PKH merupakan program andalan kementerian sosial yang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan. Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 1 ayat 1 bahwa Program Keluarga Harapan yang biasa disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga kurang mampu dan rentan yang datanya terdaftar di data terpadu program penanganan fakir miskin, kemudian diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH (Menteri Sosial Republik Indonesia, 2018).

Bantuan sosial yang disalurkan kepada KPM PKH diterima dan dikelola oleh ibu rumah tangga sebagai penanggung jawab pengelola keuangan dalam rumah tangga. Bantuan sosial tersebut disalurkan dalam empat tahap setiap tahunnya, besaran dana bantuan disesuaikan dengan komponen dalam keluarga yang menjadi beban dan biaya pengeluaran dalam

keluarga. Bantuan sosial yang diterima harus dikelola dengan baik dan bijak, agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga. Permasalahan ekonomi keluarga dapat diatasi dengan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik, karena itu PKH melalui pendamping sosial memberikan edukasi tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha.

Dalam kebijakan PKH peran perempuan sebagai ibu rumah tangga diberikan ruang yang lebih dalam menerima dan mengelola bantuan sosial untuk dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga (Nainggolan, 2019). Perempuan atau ibu rumah tangga dianggap lebih mampu dan efektif dalam mengelola keuangan rumah tangga, sehingga kesejahteraan keluarga dapat ditingkatkan (Hasrul Hanif, Diti Fatimah, Aminatun Zubaedah, Juhriati, Kanis Suvianita, Widyatama Adhi, 2015).

Ibu rumah tangga yang terdaftar dalam PKH wajib mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dan Family Development Session (FDS) untuk mendapatkan pengetahuan terkait dengan pengelolaan keuangan keluarga. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Elly Kuntjorowati menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam pengelolaan dan pengaturan keuangan keluarga antara sebelum dan sesudah KPM PKH mengikuti P2K2 dan FDS dalam sesi pengelolaan keuangan, setelah KPM PKH mengikuti kegiatan P2K2 dan FDS mereka mampu mengatur keuangan dengan mencatat semua pengeluaran baik pengeluaran tetap maupun pengeluaran tak terduga yang kemudian diseimbangkan dengan pemasukan keuangan keluarga (Kuntjorowati, 2018). Manfaat dari pengelolaan keuangan keluarga adalah kebutuhan ekonomi keluarga dapat terpenuhi secara optimal, menjaga stabilitas ekonomi keluarga, mengendalikan pengeluaran dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

3. Kontribusi pendamping PKH dalam pemberdayaan ekonomi KPM PKH

Kesuksesan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak lepas dari peran dan kontribusi pendamping PKH (Larasati, 2018). Keberhasilan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat, dipengaruhi oleh kualitas tenaga pendamping sosial PKH yang memiliki pemahaman dan penguasaan terhadap kondisi sosial masyarakat dampungan (Rusmiyati, 2018). Dalam penelitian Tryas Wardani Nurwan mengungkapkan bahwa keterampilan pendamping PKH dan Partisipasi KPM PKH mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan PKH (Hasan, 2020).

Rendi Agung Febrianto dalam penelitian yang dilakukan di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang menarik sebuah kesimpulan bahwa peran pendamping sangat signifikan dalam mempengaruhi pola perilaku dan cara pandang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengelola dan mengatur keuangan rumah tangga. Hubungannya bersifat positif yang artinya semakin tinggi pengaruh peran pendamping maka akan semakin tinggi pula perubahan perilaku KPM PKH dalam mengelola dan mengatur keuangan keluarga untuk mencapai kesejahteraan keluarga (Febrianto, 2020).

Sehingga untuk mencapai tujuan dari PKH yaitu untuk mencapai kesejahteraan KPM PKH, maka pendamping PKH direkrut, diseleksi dan di bawah pengawasan langsung oleh kementerian sosial RI yang dilaksanakan secara ketat.

Sebelum pendamping PKH terjun ke masyarakat dampungan, diberikan terlebih dahulu pendidikan dan pelatihan terkait materi PKH dan cara berinteraksi dengan masyarakat kurang mampu. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki pendamping PKH terkait dengan materi program, akan meningkatkan kualitas pelayanan sosial terhadap dampungan. Kemampuan komunikasi juga dibutuhkan dalam melakukan interaksi

dengan KPM PKH untuk mendukung keberhasilan program. Sifat-sifat responsif, ramah, mempunyai daya empati dan daya peka terhadap kondisi KPM PKH mutlak harus dimiliki oleh seorang pendamping PKH. Sejatinya pendamping PKH adalah mitra pemerintah dan mitra masyarakat yang memiliki kedudukan dalam menjembatani berbagai kepentingan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pekerja sosial dalam hal ini, pendamping PKH harus memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan profesi yang lain. Karena pendamping PKH bersentuhan langsung dengan masyarakat kurang mampu dan diharapkan mampu merubah pola pikir masyarakat dari penerima bantuan menjadi pemberi bantuan. Secara empirik, keunggulan ini dapat menekan angka kemiskinan dan meminimalisir permasalahan sosial yang ada (Sabarisma, 2019). Pendamping PKH memiliki konsep pertolongan *to help people to help themselves*. Dalam arti bahwa pendamping sosial PKH mengarahkan bentuk intervensinya dalam meningkatkan keberfungsian sosial dan kemandirian ekonomi KPM PKH agar bisa keluar dari kemiskinan.

Peran dan keterampilan sebagai fasilitator, pendidik, perwakilan dan teknikal dapat diterapkan oleh pendamping PKH dalam melakukan pendampingan KPM PKH. Namun kondisi, situasi dan lingkungan setiap masyarakat berbeda. Sehingga, peran dan keterampilan dalam melakukan pendampingan disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Fleksibilitas pendamping PKH dilapangan menjadi penentu pelaksanaan program di lapangan (Habibullah, 2011).

Pendamping PKH hadir ditengah-tengah masyarakat sebagai agen perubahan sosial dan membantu menyelesaikan persoalan sosial yang dihadapi masyarakat khususnya KPM PKH. Pendamping sosial PKH melakukan interaksi dinamis untuk bersama-sama memecahkan dan menghadapi beragam tantangan persoalan sosial

diantaranya, perencanaan perbaikan kehidupan sosial ekonomi, memobilisasi sumber daya untuk dimanfaatkan atau dikelola, membantu menyelesaikan masalah sosial yang dihadapi KPM PKH, membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan dengan perencanaan usaha dan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak yang relevan dalam pemberdayaan ekonomi KPM PKH (Andari, 2020). Peran pendamping sosial PKH sangat menentukan keberhasilan dalam mengatasi masalah sosial yang dihadapi oleh KPM PKH. Keterampilan praktis yang dimiliki oleh pendamping PKH membantu dalam penyelesaian permasalahan sosial di lapangan.

Selain itu, menurut Parsons pendamping sosial harus mampu melaksanakan lima peran, Sebagai fasilitator dalam melakukan pendampingan, peran pendamping sosial sebagai broker, peran pendamping sosial sebagai mediator, peran pendamping sosial sebagai pembela, peran pendamping sosial sebagai pelindung, dan peran pendamping sosial dalam melakukan pendampingan dalam pembinaan, pengajaran, pengarahan dalam komuditas kelompok agar masalah sosial dapat diselesaikan (Parsons, Ruth J., 1994).

Oman Sukmana dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pendamping sosial sebagai aktor pemberdayaan sudah melaksanakan perannya sebagai pemrakarsa dan inisiator proses pemberdayaan, berperan sebagai motivator untuk memberikan motivasi dan keaktifan masyarakat dalam partisipasi perbaikan kondisi ekonomi, berperan sebagai koordinator dalam melakukan koordinir terhadap seluruh aktivitas proses pemberdayaan, berperan sebagai perencana dalam merancang berbagai program pemberdayaan, berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi berbagai kebutuhan dalam proses pemberdayaan masyarakat dan berperan sebagai komunikator yang mengkomunikasikan berbagai program pemberdayaan masyarakat kepada stakeholder terkait (Sukmana, 2021).

Kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh pendamping PKH melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dan Family Development Session (FDS) yang merupakan bagian dari proses pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu yang menjadi peserta PKH. Kegiatan P2K2 dan FDS merupakan pertemuan rutin yang dilakukan pendamping PKH dengan KPM PKH dalam kurung waktu minimal satu bulan sekali. Dalam kegiatan P2K2 dan FDS pendamping PKH dapat memonitor perkembangan kondisi ekonomi KPM PKH, melakukan pengecekan penyaluran bantuan dan menyampaikan materi pembelajaran dalam modul PKH yang terbagi dalam beberapa sesi (R.A. Febrianto, Utsman, 2020).

P2K2 merupakan proses pembelajaran bagi KPM PKH untuk merubah pola perilaku yang dilakukan secara terstruktur oleh pendamping PKH, terkait pentingnya pendidikan anak, kesehatan keluarga, pengelolaan keuangan rumah tangga dan meningkatkan ekonomi keluarga melalui usaha mandiri. Hal ini, sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 1 Ayat 16. Kegiatan P2K2 merupakan pertemuan wajib bagi KPM PKH yang di fasilitasi oleh pendamping PKH (R.A. Febrianto, Utsman, 2020). Melalui kegiatan P2K2 dan FDS pendamping PKH dapat mengamati secara langsung perkembangan KPM, melakukan pengecekan penyaluran bantuan, dan menyampaikan materi pembelajaran pada modul PKH.

Materi pembelajaran yang disampaikan dalam kegiatan P2K2 dan FDS berpedoman kepada modul yang sudah terstandarisasi dan ditetapkan oleh Kementerian sosial RI. Dalam materi modul PKH terdapat beberapa materi pembahasan, salah satu materi yang wajib diajarkan dan disampaikan kepada KPM PKH yaitu materi pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Tujuan materi ini diberikan kepada KPM PKH agar dapat mengubah perilaku dalam mengelola keuangan keluarga.

Sehingga keuangan keluarga dapat dikelola dengan baik, uang pendapatan dari bekerja dan uang bantuan PKH dapat dikelola dan dimaksimalkan penggunaannya. Perencanaan usaha dan proses memulai usaha sebagai bagian dari upaya dalam pemberdayaan KPM PKH agar bisa mencapai kemandirian ekonomi dan kesejahteraan. Agar KPM PKH mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan keluarga dan merencanakan usaha sesuai dengan materi yang didapatkan dalam kegiatan P2K2 dan FDS, karena itu, perlu repetisi dan praktek agar mereka lebih paham dan terus diberikan motivasi agar ada keinginan untuk terus belajar dan mencoba membuka usaha mandiri (Machdum, 2021).

Materi yang dibahas dalam modul pengelolaan keuangan keluarga terdapat dua materi pembahasan yaitu materi pengelolaan keuangan keluarga dan perencanaan usaha. Kemiskinan erat kaitannya dengan pengaturan keuangan keluarga, karena ketika keuangan keluarga tidak diatur dengan baik maka akan menimbulkan masalah keuangan keluarga dan solusi terakhir dengan melakukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah keuangan keluarga. Perencanaan usaha harus dilakukan dengan baik agar usaha bisa mendatangkan keuntungan untuk kesejahteraan keluarga.

Tujuan dari modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha keluarga kepada KPM PKH adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta PKH tentang pentingnya pengelolaan dan pengaturan keuangan keluarga, sehingga dapat memperbaiki ekonomi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan (Murah, Ari Saputra, 2020).

Pembahasan modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha terbagi dalam tiga sesi, pada sesi pertama dijelaskan bagaimana mengatur dan mengelola keuangan keluarga agar dapat menyeimbangkan

pengeluaran dan pendapatan keluarga. Dalam hal ini, pendamping PKH mengajak KPM PKH untuk menghitung pengeluaran bulanan dan rata-rata pendapatan keluarga, membuat daftar prioritas pengeluaran berdasarkan dengan anggaran bulanan yang tersedia dengan membedakan antara kebutuhan dan keinginan, kebutuhan menjadi prioritas sementara keinginan dapat ditunda, kemudian merencanakan pengendalian pengeluaran sesuai dengan anggaran keuangan keluarga (kementerian sosial RI, 2018).

Anggaran keuangan keluarga dapat dikelola dengan mendata seluruh pemasukan atau pendapatan keluarga yang diperoleh dalam setiap periode tertentu (M. R. dan M. Apriyanto, 2020). Pendapatan keluarga perlu untuk dibuatkan catatan agar diketahui berapa besar pendapatan keluarga dalam per bulannya, sehingga dapat diatur pengeluaran rutin setiap bulannya dengan membuat daftar belanja bulanan yang disesuaikan dengan pendapatan total keluarga. Kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi seperti beras, ikan, gula pasir, minyak goreng, bayar listrik, gas kompor dan kebutuhan yang lain. Kebutuhan keluarga tersebut dibuatkan daftar yang kemudian dijumlahkan dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran keuangan keluarga.

Pengeluaran rutin yang sudah direncanakan harus dicocokkan dengan total pendapatan keluarga yang disusun dalam anggaran harian, mingguan dan bulanan keluarga. Ketika pengeluaran yang sudah direncanakan melebihi dari anggaran pendapatan keluarga, maka dilakukan seleksi terhadap pemenuhan kebutuhan, diutamakan pemenuhan kebutuhan yang mendesak dan harus dipenuhi. Pengeluaran untuk memenuhi keinginan dapat dikurangi, ditunda atau dibatalkan agar pengeluaran dapat seimbang dengan pendapatan keluarga. Pendapatan keluarga harus diprioritaskan terhadap kebutuhan yang sudah dianggarkan, ketika terdapat kesisahan anggaran keuangan

keluarga maka sebaiknya disimpan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak direncanakan.

Meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga merupakan solusi terakhir dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, sehingga dibutuhkan kesadaran untuk menabung secara disiplin dan rutin. Dalam modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha pada materi sesi kedua dibahas cara meminjam atau berhutang dengan cermat dan menabung, tujuannya untuk memberikan keterampilan kepada KPM PKH agar berhati-hati dalam meminjam uang dan harus direncanakan dengan baik agar tidak terjebak dalam lilitan hutang yang tidak ada ujungnya. Tempat meminjam uang menjadi salah satu pertimbangan sebelum berhutang, memilih tempat yang memberikan angsuran pinjaman dengan bunga yang rendah, persyaratan yang tidak ribet, lembaga yang resmi dan sebaiknya menghindari rentenir. Selain itu, materi dalam sesi ini pendamping PKH juga berusaha membangkitkan kesadaran peserta KPM PKH tentang pentingnya menabung secara rutin dan disiplin untuk mengurangi kemungkinan berhutang kembali.

Selanjutnya dalam sesi ketiga, pendamping PKH memberikan penjelasan bagaimana cara memulai usaha, peserta KPM PKH diberikan pemahaman mengenai bagaimana memulai usaha, mengembangkan dan mengavaluasi keberlanjutan usaha, sehingga usaha yang dikelola bisa menjadi sumber pendapatan keluarga. Memulai suatu usaha perlu melakukan identifikasi terhadap potensi sumber daya alam yang bisa dikelola untuk menjadi peluang usaha. Kondisi lingkungan dengan sumber daya yang mendukung bisa menjadi modal awal dalam memulai usaha. Keterampilan dan pengetahuan dalam mengelola suatu usaha dibutuhkan dalam pengembangan usaha.

Suatu ide usaha tidak bisa langsung dilaksanakan begitu saja perlu menilai

kelayakan ide usaha agar bisa dikembangkan untuk mendapatkan keuntungan usaha. Perencanaan keuangan usaha dan pemasaran usaha perlu dikelola dengan baik agar bisa dihitung keuntungan dan kerugian usaha. Selain itu, untuk memulai usaha dibutuhkan modal usaha dalam bentuk uang ataupun barang yang sumbernya bisa dari dana pribadi (tabungan/simpanan) atau pinjaman (kredit). Modal usaha yang berasal dari pinjaman memiliki resiko yang besar dibandingkan menggukon modal dari dana pribadi.

Kehabisan uang untuk modal kembali merupakan masalah dalam pengembangan usaha. Untuk dapat memastikan kelanjutan suatu usaha maka keuntungan dari usaha perlu disisihkan sebagai modal cadangan. Sehingga dibutuhkan catatan kas harian untuk mengetahui pemasukan dan pengeluaran suatu usaha. Pada setiap priode mingguan atau bulanan catatan kas harian dapat memberikan gambaran suatu usaha, apakah memberikan keuntungan (total pemasukan lebih besar) atau kerugian (total pengeluaran lebih besar) (kementerian sosial RI, 2018). Catatan kas harian dapat membantu mengetahui pemasukan apa saja yang kurang dan pengeluaran apa saja yang melebihi dari anggaran yang telah buat. Sehingga masalah dalam pengembangan usaha dapat diatasi dan mencegah agar kerugian usaha tidak terjadi. Selain itu, catatan kas harian dapat membantu mengetahui barang atau produk yang banyak diminati komsumen dan pada hari apa saja transaksi penjualan yang banyak, sehingga dapat disediakan stok barang dan menyiasati langkah atau strategi penjualan berikutnya.

Peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan merupakan wujud dari pemberdayaan masyarakat. Masyarakat kurang mampu tidak kemudian diberikan stigma negatif bahwa hanya bisa menerima bantuan secara langsung, tetapi harus dipandang positif untuk dibimbing dalam meningkatkan kapasitas diri guna perbaikan kondisi ekonomi menuju kesejahteraan. Lasarus Jehamat mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan KPM

PKH perlu peran aktiv pemdamping PKH dalam membantu membuat strategi perencanaan anggaran individu, merintis usaha mikro, membangun jejaring sosial untuk memasarkan produk. Sehingga jiwa inovatif, kreatif dan produktif dimiliki KPM PKH dalam mengelola dana bantuan PKH (Lasarus Jehamat, 2021).

Pendamping PKH memiliki tugas dan tanggung jawab pendukung untuk meningkatkan kapasitas diri KPM PKH dan menginjeksi semangat kemandirian ekonomi dalam rangka pemberdayaan KPM PKH. Setelah KPM PKH diberikan materi pengelolaan keuangan keluarga dan perencanaan usaha, pendamping PKH dapat mengarahkan KPM PKH untuk membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk memulai usaha.

Melalui pelatihan dan pendampinga KUBE pemberdayaan ekonomi KPM PKH bisa diwujudkan. Pendamping PKH memberikan dorongan dan semangat jiwa kewirausahaan agar KPM PKH mau dan berani memulai usaha, yang kedepannya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi PKH (Kussujaniatun, 2020), sehingga KPM PKH tidak bergantung kepada bantuan administratif PKH yang sifatnya terbatas dan sementara, karena tujuan jangka panjang PKH adalah memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia (Mulyana, 2020).

Peran aktif pendamping PKH sangat dibutuhkan dalam pengembangan KUBE binaan, sejatinya setiap keluarga memiliki sumber daya yang bisa dibina dan kerahkan untuk memaksimalkan potensi usaha yang bisa dikembangkan melalui usaha KUBE (Nugraheni, 2018). Elektronik Warung Gotong Royong KUBE PKH (E-Warung KUBE PKH) merupakan salah satu sarana usaha yang bisa dimanfaatkan dan dikelola oleh KPM PKH sebagai tempat usaha dan agen penerima bantuan KUBE PKH dan Rastra yang

pelaksanaannya dilakukan secara non tunai (Amalia, 2018).

Pengembangan usaha KUBE PKH dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas usaha dan keterampilan dalam pengelolaan usaha, menambah modal dengan membuka jejaring akses ke lembaga keuangan mikro (Krisna, 2016). Selain itu, untuk menjadi unit usaha yang lebih mandiri, tumbuh, berkelanjutan dan siap bersaing dengan unit usaha mikro yang lain, perlu meningkatkan produk usaha, menjaga kualitas, mempertahankan kepercayaan konsumen dan perlindungan usaha.

Manfaat pemberdayaan melalui program KUBE PKH dapat dirasakan oleh anggota dan warga sekitar, diantara manfaat KUBE PKH sebagaimana yang diungkapkan oleh Togiartua Nainggolan yaitu manfaat sosial, dengan adanya KUBE PKH membuat interaksi sosial antara anggota dan masyarakat semakin harmonis, manfaat ekonomi melalui KUBE PKH anggota dan masyarakat dapat mendapatkan keuntungan ekonomi, karena masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga yang murah dan terjangkau, dan manfaat budaya, melalui usaha KUBE PKH menumbuhkan semangat jiwa kewirausahaan masyarakat kurang mampu (Nainggolan, 2016).

Dalam beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping PKH berperan aktif dalam peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kurang mampu. Pendamping PKH mempunyai peran yang penting dalam mengorganisir KPM PKH dengan strategi, mekanisme dan proses pendampingan, sehingga KPM PKH mampu memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya (Lasarus Jehamat, 2021). Kesejahteraan KPM PKH menjadi tujuan dari program PKH. Namun demikian, kesejahteraan KPM PKH bukan hanya menjadi tugas pemerintah dan pendamping PKH, tetapi menjadi tanggung jawab berbagai pihak. KPM PKH harus punya kemauan dan motivasi untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga agar bisa

keluar dari kepesertaan PKH. Dengan partisipasi dan keterlibatan berbagai pihak KPM PKH diharapkan dapat menolong dirinya sendiri melalui usaha kreatif. Pemerintah dan pendamping PKH hanya menjadi fasilitator yang menjadi aktor utama kesejahteraan keluarga adalah KPM itu sendiri.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bagian hasil dan pembahasan, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan dan perencanaan keuangan keluarga membutuhkan strategi yang tepat karena setiap keluarga memiliki permasalahan keuangan yang berbeda. Namun demikian strategi dalam perencanaan keuangan keluarga harus terencana dengan baik dan dibuat sesuai dengan kondisi keuangan keluarga. Strategi pengelolaan keuangan rumah tangga merupakan hal yang urgen karena memiliki implikasi terhadap masa depan keluarga. Pandemi Covid-19 berdampak terhadap kondisi keuangan keluarga dengan berkurangnya penghasilan keluarga membutuhkan kebijakan dalam mengatur keuangan keluarga.

Peran perempuan sebagai ibu rumah tangga dalam keluarga tidak bisa dinapikan dan dipandang sebelah mata, karena masa depan keluarga sangat ditentukan oleh peran ibu rumah tangga dalam mengatur dan mengelola keuangan keluarga. Ibu rumah tangga adalah manajer dalam keluarga. Melalui kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH), perempuan sebagai ibu rumah tangga diberikan kepercayaan untuk menerima dan mengelola dana bantuan sosial. Pemberdayaan ekonomi keluarga melalui PKH, Ibu rumah tangga didampingi dan diberikan materi terkait pengelolaan keuangan keluarga dan perencanaan usaha. Sehingga sumber penghasilan keluarga bukan hanya dari suami sebagai kepala rumah tangga tetapi ibu rumah

tangga bisa membuka usaha KUBE bersama dengan KPM PKH.

Keterlibatan pendamping PKH sangat dibutuhkan dalam keberhasilan program, pendamping PKH bersentuhan langsung dengan KPM PKH, sehingga memiliki hubungan emosional. Dalam kegiatan P2K2 dan FDS pendamping PKH menjadi guru, teman curhat, fasilitator dan intermediasi terhadap persoalan sosial ekonomi yang dihadapi oleh KPM PKH. Pendamping PKH dapat memaksimalkan berbagai program pemberdayaan yang dicanangkan oleh pemerintah untuk perbaikan kondisi ekonomi KPM PKH.

2. Implikasi Kebijakan

Rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial agar pendamping PKH lebih ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilannya, karena pendamping PKH merupakan ujung tombak terlaksananya program. Pendamping PKH yang belum mendapatkan pelatihan terkait Modul P2K2 dan FDS perlu diberikan pelatihan. Sehingga setiap pendamping PKH memahami dan melaksanakan tugas pendampingan kepada KPM PKH dengan penuh tanggungjawab agar KPM PKH yang didampingi dapat berdaya secara ekonomi. Namun demikian kesejahteraan dan keberdayaan ekonomi KPM PKH bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah dan pendamping PKH tetapi butuh kerja sama dan kepedulian dari berbagai pihak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak baik individu maupun lembaga yang telah mendukung pelaksanaan penelitian dan penulisan artikel ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Supandi Soegoto, Diana N. Lintong, Syermi S.E. Mintalangi, D. S. (2020). Meningkatkan Peran ibu rumah tangga

dalam pengelolaan keuangan. *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 4(1). <https://doi.org/DOI:10.30595/jppm.v0i0.5545>

Amalia, A. D. (2018). Jaringan Sosial E-Warong Kube dan PKH dalam Hal Penanganan Kemiskinan Pada E-Warong Cahaya Dini Kota Pekanbaru. *Sosio Informa*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.33007/inf.v4i1>

Andari, S. (2020). Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Sosial. *Sosio Informa*, 6(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33007/inf.v6i2>

Andayani, L. S. H. dan E. (2019). Manajemen keuangan pribadi: literasi ekonomi, literasi keuangan, dan kecerdasan spiritual. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 15(3), 162–170. <https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jem.v15i3.4411>

Antoni Japari, dan A. H. M. (2010). *10 Panduan Mengelola Keuangan Keluarga (Financial Planning & Wealth Management)*. ABFI Institut Perbanas.

Apriyanto, M. (2019). Pelatihan Dan Pendampingan Pengolahan Komoditas Kelapa. *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 3(2), 179–183. <https://doi.org/10.30595/jppm.v3i2.3691>

Apriyanto, M. R. dan M. (2020). Manajemen Keuangan untuk Meningkatkan Perekonomian Keluarga di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Selodang Mayang*, 6(3), 145–152.

Aswiyati, I. (2016). Peran Wanita dalam Menunjang Perekonomian Rumah Tangga Keluarga Petani Tradisional untuk Penanggulangan Kemiskinan di Desa Kuwil Kecamatan Kalawat. *Jurnal Holistik*, 9(17), 1–18.

Evan Notatema Hia, M. S. dan N. A. (2021). Implementasi Family Development Session Program Keluarga Harapan. *PERSPEKTIF*, 10(1), 128–139. <https://doi.org/DOI:10.31289/perspektif.v10i1.4146>

- Febrianto, R. A. (2020). *Pengaruh Peran Pendamping dan Motivasi Belajar terhadap Perubahan Perilaku Pengelolaan Keuangan Pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)*. Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.
- Fitria Nur Masithoh, H. W. dan C. W. (2016). Konsep Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga dalam Memajukan Kesejahteraan. *National Conference On Economic Education*, 530–542.
- Garlans, S. . (2014). Motivasi Sebagai Penentu Perencanaan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 9(1), 42-48.
- Habibullah. (2011). Peran Pendamping Pada Program Keluarga Harapandi Kabupaten Karawang. *Informasi : Permasalahan Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 16(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33007/inf.v16i2.956>
- Hasan, T. W. N. dan H. (2020). Keberhasilan PKH Ditinjau Dalam Kaitannya Dengan Keterampilan Pendamping Dan Partisipasi KPM: Studi Di Sijunjung Sumatera Barat. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 10(1), 1–13. <https://doi.org/DOI:10.33007/ska.v10i1.2035>
- Hasrul Hanif, Dati Fatimah, Aminatun Zubaedah, Juhriati, Kanis Suvianita, Widyatama Adhi, dan Z. M. (2015). *Mewujudkan Program Keluarga Harapan (PKH) yang Lebih Bermakna: Analisa Gender terhadap Implementasi PKH di Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur) dan Kabupaten Bima (Nusa Tenggara Barat)*. Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Hermaliana, M. (2019). Manajemen keuangan Keluarga untuk Mengokohkan Keutuhan Rumah Tangga. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 1(1), 101.
- Iping, B. (2020). Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi dan Sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2).
- kementerian sosial RI. (2018). *Modul Pengelolaan Keuangan & Perencanaan Usaha (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Program Keluarga Harapan (PKH)* (p. 4).
- Kisworo, E. R. dan B. (2017). Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 1(2), 161–169. <https://doi.org/DOI:10.15294/pls.v1i2.16271>
- Krisna. (2016). Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Sosio Informa*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33007/inf.v2i2>
- Kuntjorowati, E. (2018). Pengaruh Pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan melalui Family Development Session. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 17(2), 89–100.
- Kusnadi, I. L. P. dan. (2021). Pelatihan Akuntansi Dasar Dan Pembukuan Sederhana Bagi Ibu Rumah Tangga Di Desa Rajabasa. *JAPMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Prodi Akuntansi*, 1(1). <http://www.ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/pkmakuntansi/article/view/4535/2803>
- Kussujaniatun, A. S. H. dan S. (2020). *Penguatan Kelompok Usaha Bersama Kube sebagai Model Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional “Veteran.”
- Larasati, L. dan D. C. (2018). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7.
- Lasarus Jehamat, Y. E. J. dan C. E. M. (2021). Praktik Baik Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Program PKH Setelah Exit Program Dalam Meningkatkan Kesejahteraan. *Sosio Konsepsia: Jurnal*

Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 10(2), 122–137. <https://doi.org/10.33007/ska.v10i2.2360>

- Machdum, R. A. H. A. P. dan S. V. (2021). Proses Pemberdayaan Pada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga Sesi Pengelolaan Keuangan (Studi Deskriptif Di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Dki Ja. *JPM: Jurnal Pembangunan Manusia*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.7454/jpm.v2i1.1018>
- Maya Widiana Dewi, I. L. K. dan K. (2021). Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Budimas*, 3(1), 155–159.
- Muhammad Ramli, M. A. (2020). Manajemen Keuangan untuk Meningkatkan Perekonomian Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Selodang Mayang*, 6(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v6i3>
- Mulyana, P. E. R. dan N. (2020). Peran Pendamping dalam Pengembangan Usaha Kelompok Binaan Program Keluarga Harapan (PKH) (Di Desa Lebakagung Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut). *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i1.27049>
- Murah, Ari Saputra, R. A. A. (2020). Analisis Efisiensi, Efektivitas Dan Responsivitas Program Family Development Session Program Keluarga Harapan (Fds-Pkh) Di Kabupaten Lombok Timur. *Journal Ilmiah Rinjani (JIR) Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani*, 8(2).
- Nainggolan, T. (2016). Pemberdayaan Peserta Program Keluarga Harapan Melalui Kelompok Usaha Bersama Di Nagari Muaro Gadang Air Haji - Pesisir Selatan. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 5(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.33007/ska.v5i3.211>
- Nainggolan, T. (2019). Aspek Gender dalam Urgensi Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan
- Program Keluarga Harapan Gender Aspects In The Hope Family Program. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 5(1).
- Nawangsari, S. C. dan. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(2), 68.
- Ningsih, P. A. (2021). *Rekonstruksi Manajemen Keuangan Keluarga dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau.
- Nugraheni, M. T. dan M. (2018). Peran Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga. *Sosio Informa*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33007/inf.v4i2>
- Pangeran, P. (2012). Sikap Keuangan Rumah Tangga Desa pada Aspek Perencanaan Keuangan. *JRAK*, 8(1), 35–50.
- Parsons, Ruth J., J. D. J. dan S. H. H. (1994). *The Integration of Sosial Work Practice*. MacMillan.
- Prasetyo, A. (2010). *Employionaire Karyawan Berkehidupan Direktur*. Citra Media.
- Puspitawati, H. (2010). Analisis Structural Equation Modelling tentang Relasi Gender, Tingkat Stres, Dan Kualitas Perkawinan Pada Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH). *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*.
- R.A. Febrianto, Utsman, dan A. R. R. (2020). Pengaruh Peran Pendamping dan Motivasi Belajar Terhadap Perubahan Perilaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 100.
- Rahmah, S. (2014). pola pengelolaan keuangan keluarga pada Ibu rumah tangga (studi pada ibu rumah tangga Yang bekerja sebagai cleaning service Di uin sultan syarif kasim riau). *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 143.
- Ramli, M., & Apriyanto, M. (2020).

- Manajemen Keuangan Untuk Meningkatkan Perekonomian Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal BAPPEDA*, 10, 1–8.
- Rusmiyati, E. H. dan C. (2018). Mengembangkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial di Daerah. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 17(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.31105/jpks.v17i4>
- Rustandi Kartawinata, B., & Ikhwan Mubaraq, M. (2018). Pengaruh Kompetensi Keuangan Terhadap Literasi Keuangan Bagi Wanita Di Makassar. *OIKOS Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 2, 87–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/oikos.v2i1.1029>
- Sabarisma, M. (2019). Peran Pendamping Sosial Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Pangan. *Sosio Informa*, 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33007/inf.v5i2>
- Sabinus Beni, Blasius Manggu, dan Y. D. S. (2020). Penyuluhan Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan Usaha Di Desa Bani Amas Kecamatan Bengkayang. *GERVASI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31571/gervasi.v4i1.1748>
- Santoso, F. . (2018). Pelatihan akuntansi dasar perencanaan keuangan keluarga di rw 40 kampung pasekan maguwoharjo. *Implementasi Teknologi Tepat Guna Kepada Masyarakat*, 79–84.
- Sawal, A. S. dan A. R. (2020). Peran Akuntansi dalam Rumah Tangga dan Penerapan Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Secara Islami Di Masa Pandemi Covid-19. *Assets : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/asse>
- ts.v10i2.18594
- Setiowati, N. E. (2016). Perempuan dan Strategi Nafkah dan Akuntansi Rumah Tangga. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 299. https://web.archive.org/web/20180413132905id_/http://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/amwal/article/viewFile/664/545
- Sina, P. G. (2020). Ekonomi Rumah Tangga Di Era Pandemi Covid-19. *Journal Of Management: Small and Medium (SME's)*, 12(2).
- Siregar, B. G. (2019). Ibu Rumah Tangga dalam Manajemen Keuangan Keluarga. *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 3(2). web: jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JurnalGender
- Suarmini, S. Z. dan N. W. (2018). Peran Perempuan dalam Keluarga. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 64.
- Sukmana, O. (2021). Literasi dan Peran Aktor Pemberdaya Dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas Di Kampung Wolulas, Malang. *SOSIOKONSEPSIA: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 11(1), 291–306. <https://doi.org/https://doi.org/10.33007/ska.v11i1.2390291>
- Sulni, M. A. dan M. (2021). Program Keluarga Harapan dan Upaya Pemenuhan Kebutuhan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19 pada Kabupaten Polewali Mandar. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 11(1), 307–319. <https://doi.org/https://doi.org/10.33007/ska.v11i1.2458>
- Syarifah, J. dan M. P. (2018). Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga. *Noura: Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 2(2).
- Syhatan, H. (2004). *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*. mema insani.